



Implementasi Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan pada Belanja Daerah UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan

INFO PENULIS

Nur Soliha
Universitas Terbuka
043033844@ecampus.ut.ac.id

Sarlina Sari
Universitas Bina Sarana Informatika
sarlina.ssq@bsi.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 3, Desember 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Soliha, N., & Sari, S. (2024). Implementasi Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan pada Belanja Daerah UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1212-1221.

Abstrak

Implementasi penggunaan sistem aplikasi keuangan telah menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Studi ini mengkaji implementasi penggunaan sistem aplikasi keuangan dalam pengelolaan belanja daerah pada UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi aplikasi tersebut dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah. Metodologi yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara dengan pegawai terkait, dan analisis dokumen keuangan sebelum dan sesudah penerapan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem aplikasi keuangan telah meningkatkan kecepatan pemrosesan data, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan, serta mempermudah pengawasan dan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis dan kebutuhan pelatihan tambahan bagi staf untuk memaksimalkan manfaat dari sistem ini. Secara keseluruhan, implementasi aplikasi keuangan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan belanja daerah di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Sistem Aplikasi Keuangan, UPTD Bapenda Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan.

Abstract

Implementation of the use of financial application systems has become the main focus for regional governments in efforts to increase the efficiency and transparency of regional financial management. This study examines the implementation of the use of financial application systems in managing regional expenditure at UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan . The main aim of this paper is to evaluate the effectiveness and efficiency of this application in increasing the transparency and accuracy of regional financial management. The methodology used includes direct observation, interviews with relevant employees, and analysis of financial documents before and after implementing the application. The research results show that the use of financial application systems has increased data processing speed, reduced human error in recording, and made financial monitoring and reporting easier. However, there are some technical challenges and the need for additional training for staff to maximize the benefits of this system. Overall, the implementation of this financial application has a significant positive impact on regional expenditure management at UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan.

Keywords: Financial Application System, Regional Government, UPTD Bapenda Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam pemerintahan, yang mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik. Dengan semakin kompleksnya administrasi keuangan, diperlukan sistem yang mampu mendukung proses pengelolaan tersebut secara lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi, melalui penggunaan sistem aplikasi keuangan, telah menawarkan solusi yang dapat mengubah dan menyederhanakan berbagai proses administrasi keuangan pada Pemerintah Daerah. Dengan adanya sistem aplikasi keuangan, proses pengelolaan anggaran dan belanja daerah diharapkan lebih terstruktur, akurat, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018).

Demikian pula, UPTD. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan adalah salah satu unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya, UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A wilayah Tarakan telah mengimplementasikan sistem aplikasi keuangan. Sistem ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan proses administrasi, dan kurangnya transparansi.

Berdasarkan implementasi penggunaan sistem aplikasi keuangan di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan, terdapat beberapa rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana implementasi penggunaan sistem aplikasi keuangan pada belanja daerah di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem aplikasi keuangan di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan?
3. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut?

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penggunaan sistem aplikasi keuangan di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi aplikasi tersebut dalam meningkatkan pengelolaan belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah serta memberikan wawasan praktis bagi pemerintah daerah lainnya yang berencana untuk mengadopsi sistem aplikasi keuangan serupa.

Sistem aplikasi keuangan adalah alat bantu dalam pengelolaan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan. Menurut

Mardiasmo (2018), aplikasi keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Halim dan Kusufi (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan transparan.

Sejak tahun 2002 ditetapkan Kepmendagri 29/2002 yang mengacu pada PP Nomor 105 tahun 2000 dan UU Nomor 25 tahun 1999 mengenai pengimplementasian model struktur otoritas baru dan rancangan sistem informasi akuntansi yang baru di seluruh Indonesia. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber – sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) Bankaltimtara adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi dan mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah (pemda). Sedangkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sistem yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri republik indonesia untuk mendukung pengelolaan informasi dan administrasi pemerintahan daerah.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi sistem aplikasi keuangan pada pengelolaan belanja daerah di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai proses dan hasil dari penerapan sistem aplikasi keuangan tersebut.

Pengumpulan data diperoleh melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi langsung dilakukan terhadap proses kerja sehari-hari di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan, khususnya pada bagian keuangan yang mengatur belanja daerah dengan menggunakan sistem aplikasi keuangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa informan kunci, termasuk kepala UPTD, staf administrasi keuangan, dan operator aplikasi keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. Sedangkan Analisis dokumen dilakukan terhadap jenis aplikasi keuangan belanja daerah, dan pelaksanaan keuangan belanja daerah sebelum dan sesudah implementasi aplikasi.

Berikut informan yang memberikan informasi terkait penggunaan sistem aplikasi keuangan pada UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan dijelaskan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Informan Kunci dalam penggunaan sistem aplikasi keuangan belanja daerah

No.	Nama Informan	Jabatan	Jabatan Pengelola Keuangan
1.	Irawan, SE	Kepala UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan	Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
2.	Tajrim Karim, S. Sos	Kepala Seksi pembukuan dan Penagihan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.	Muhammad Yudi Henra, S.Ip	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
4.	Heppy Prayogo	Pengadministrasi Keuangan	Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP)
5.	Ricci Galih Gemilang, SE	Analisis Pemeriksa Pajak	Operator Aplikasi SIPD Perencanaan
6.	Tiara Rizki Emilia	Pengadministrasi Kepegawaian	Operator Sistem Kepegawaian (Simpeg)

No.	Nama Informan	Jabatan	Jabatan Pengelola Keuangan
7.	Aftina Nulin Pratiwi, A. Md	Verifikator Keuangan	Operator Aplikasi SIPD Pengeluaran
8.	Selly Melinda Baharudin, S. S	Tenaga Administrasi	Staf Administrasi Bendahara Pengeluaran

Sumber : Data Kepegawaian UPTD Bapenda Prov. Kaltara Kelas A Wilayah Tarakan

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dan dipilah untuk menemukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan implementasi dan dampak penggunaan aplikasi keuangan. Berdasarkan data yang telah disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi keuangan.

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengontraskan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Selain itu, mengonfirmasi temuan penelitian kepada para informan untuk memastikan akurasi dan keabsahan informasi. Berdasarkan data yang telah disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi keuangan. Triangulasi sumber didapat dari beberapa pegawai yang dapat dijelaskan pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Informan Kunci terkait perbandingan dalam penggunaan sistem aplikasi keuangan belanja daerah

No.	Nama Informan	Jabatan	Jabatan Pengelola Keuangan
1.	Fatmawati	Pengadministrasi Umum	Bendahara Barang Pembantu
2.	Via Fitria, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Operator Simda BMD
3.	Windayani S.HUT	Analisis Penagihan Pajak	Operator Siao

Sumber : Data Kepegawaian UPTD Bapenda Prov. Kaltara Kelas A Wilayah Tarakan

Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup hasil dan pembahasan. Tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan mendalam mengenai implementasi sistem aplikasi keuangan di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan serta menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya yang berencana untuk menerapkan sistem serupa.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem aplikasi keuangan pada belanja daerah adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menangani tugas-tugas spesifik dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, penggajian, dan rekonsiliasi bank. Sistem tersebut juga membantu mengubah proses keuangan rutin secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi pembayaran dan pencatatan transaksi belanja daerah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para informan kunci, terdapat 2 jenis sistem aplikasi keuangan belanja daerah yang digunakan oleh UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan. Penjelasan aplikasi tersebut terdapat pada Tabel 3 dibawah ini :

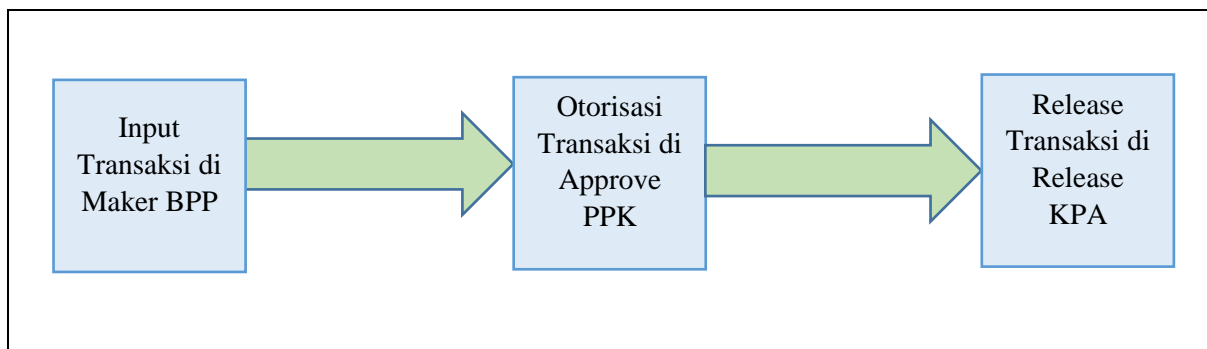
Tabel 3. Efektivitas penggunaan Aplikasi Keuangan Belanja Pemerintah Daerah

No.	Nama Aplikasi	Tujuan	Fungsi	Efektif /Tidak
1.	Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) Bankaltimtara	Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran serta transaksi keuangan	Melaksanakan pembayaran setiap transaksi belanja Pemerintah Daerah secara non tunai.	Efektif

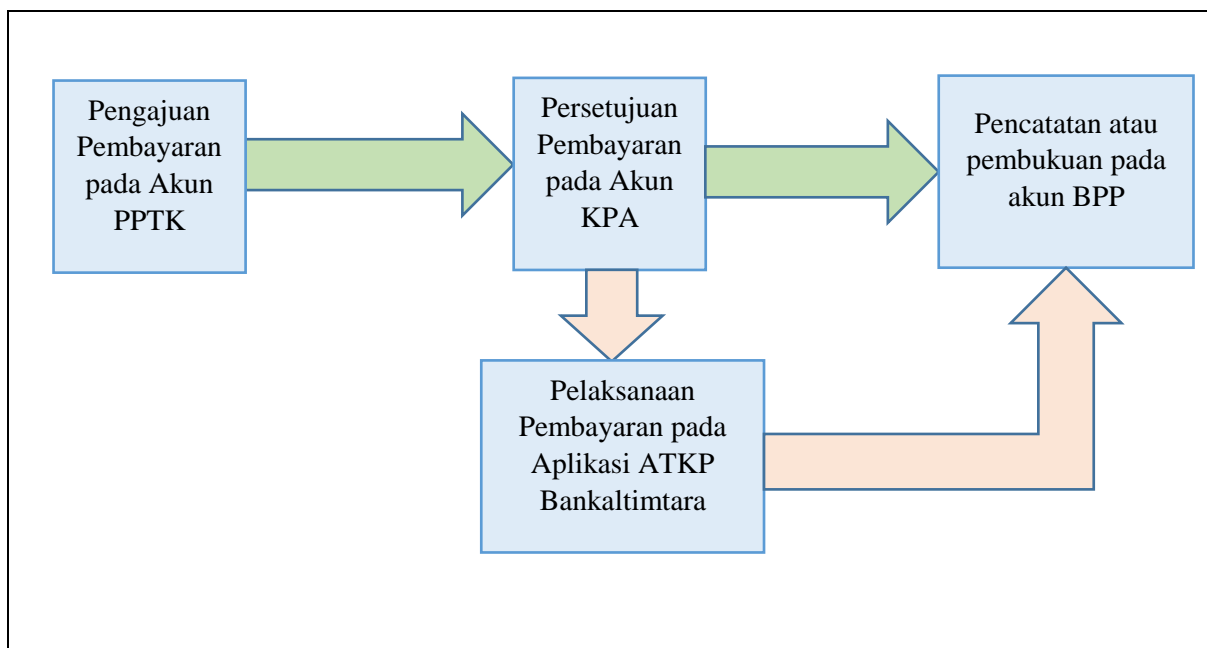
<p>2. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</p>	<p>pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sektor pemerintahan daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.</p>	<p>Melaksanakan Pencatatan atau pembukuan setiap transaksi belanja Pemerintah Daerah dari pengajuan hingga selesai pembayaran.</p>	<p>Efektif</p>
--	--	--	----------------

Kedua aplikasi tersebut, aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) Bankaltimtara dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi yang digunakan pada bidang Bendahara pengeluaran yang mencatat belanja UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A wilayah Tarakan.

Dengan mengacu pada data tabel 3 diatas, bahwa terdapat alur proses implementasi penggunaan aplikasi keuangan yang digunakan UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan dapat dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini :



Gambar 1. Proses Alur penggunaan Aplikasi ATPK Bankaltimtara



Gambar 2. Proses Alur penggunaan Aplikasi SIPD Kemendagri

Hasil juga didapat dari perbandingan penggunaan aplikasi sebelum dan sesudah. Perbandingan implementasi penggunaan sistem aplikasi keuangan belanja Pemerintah daerah dapat dijelaskan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Implementasi Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Belanja Daerah

No.	Jenis Aplikasi	Sebelum	Sesudah
1.	Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) Bankaltimtara	<ul style="list-style-type: none"> • Manual dan sering memakan waktu. • Rentan terhadap kesalahan manusia. • Sulit untuk melacak perubahan dan alokasi anggaran secara real-time. • Pencatatan tidak terstruktur. • Laporan keuangan sering kali tidak akurat atau terlambat. • Penggunaan uang tunai tinggi. • Keterbukaan informasi terbatas. • Kesulitan dalam audit dan pengawasan keuangan. • Pemantauan kinerja keuangan tidak optimal. Sistem terpisah-pisah dan tidak saling terhubung. • Sulit untuk menyatukan data dari berbagai sektor • Proses administrasi dan layanan lambat. • Kurang efisien dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses lebih cepat dan efisien. • Mengurangi kesalahan manusia dengan sistem otomatis. • Memungkinkan pemantauan anggaran secara real-time dan akurat. • Pencatatan lebih terstruktur dan terorganisir. • Laporan keuangan lebih akurat dan tepat waktu. • Meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai, mengurangi risiko penyelewengan. • Informasi keuangan lebih terbuka dan mudah diakses. • Memudahkan audit dan pengawasan dengan laporan yang sesuai standar akuntansi. • Pemantauan kinerja keuangan menjadi lebih efektif. • Sistem terintegrasi dengan baik, memudahkan pertukaran data. • Data dari berbagai sektor dapat dikoordinasikan dengan lebih mudah. • Sistem terintegrasi dengan baik, memudahkan pertukaran data. • Data dari berbagai sektor dapat dikoordinasikan dengan lebih mudah.
2.	SIPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan sering manual dan tidak terkoordinasi dengan baik. • Data perencanaan terpisah-pisah dan sulit diakses. • Kesulitan dalam sinkronisasi rencana pembangunan antara berbagai departemen dan tingkatan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. • Data perencanaan terpusat dan mudah diakses oleh berbagai pihak terkait. • Sinkronisasi rencana pembangunan lebih baik antar departemen dan tingkatan pemerintahan.

<p>Pengelolaan anggaran dilakukan secara manual atau menggunakan sistem terpisah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentan terhadap kesalahan input dan manipulasi data. • Sulit melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara efektif. • Proses pelaporan yang lambat dan tidak konsisten. • Evaluasi kinerja tidak terstandarisasi dan memerlukan waktu yang lama. • Kesulitan dalam mengumpulkan data untuk pelaporan yang akurat. • Data tersebar di berbagai instansi tanpa ada integrasi. • Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan up-to-date. • Penyimpanan data yang tidak terpusat menyebabkan redundansi dan inkonsistensi. • Proses administrasi yang lambat dan tidak efisien. • Pelayanan publik sering kali terhambat karena ketidaktersediaan data yang cepat dan akurat. • Kesulitan dalam memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. 	<p>Pengelolaan anggaran dilakukan secara digital dan terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kesalahan input dan manipulasi data. • Monitoring dan evaluasi anggaran lebih efektif dan real-time. • Pelaporan lebih cepat dan konsisten sesuai standar yang ditetapkan. • Evaluasi kinerja lebih terstandarisasi dan dapat dilakukan secara berkala. • Data untuk pelaporan lebih mudah dikumpulkan dan lebih akurat. Data terintegrasi di satu sistem yang terpusat. • Akses data yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. • Penyimpanan data yang terpusat mengurangi redundansi dan inkonsistensi. • Proses administrasi lebih cepat dan efisien. • Pelayanan publik lebih baik karena data tersedia secara cepat dan akurat. • Transparansi informasi kepada masyarakat meningkat.
--	--

Penggunaan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebelum penggunaan ATKP, pengelolaan anggaran dan transaksi keuangan cenderung manual, tidak terstruktur, dan rentan terhadap kesalahan serta penyelewengan. Setelah implementasi ATKP, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Demikian pula dengan penggunaan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) oleh Kemendagri membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah pada UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. Sebelum implementasi SIPD, proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan manajemen data dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi, yang menyebabkan

ketidakefisienan dan kurangnya transparansi. Setelah implementasi SIPD, semua proses tersebut menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Sistem ini mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sektor pemerintahan daerah, memungkinkan akses real-time, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Selain membawa perubahan positif, kedua sistem aplikasi tersebut juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut merupakan kendala yang harus dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kendala dan cara mengatasinya dapat dijelaskan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jenis Kendala dan Cara Mengatasi

No.	Jenis Kendala	Kendala yang dihadapi	Cara mengatasi
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Tidak semua pegawai memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem aplikasi keuangan	Melakukan Pelatihan Pegawai. Dengan menyelenggarakan pelatihan secara berkala dapat meningkatkan keterampilan pegawai.
2.	Infrastruktur Teknologi	Terkadang terjadi gangguan jaringan yang menghambat akses ke sistem aplikasi.	Melakukan Peningkatan Infrastruktur. Dengan mengupgrade infrastruktur teknologi dapat memastikan kelancaran akses ke sistem aplikasi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi implementasi sistem aplikasi keuangan pada pengelolaan belanja daerah di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan pada berikut ini :

a. Peningkatan Efektivitas

Sistem aplikasi keuangan terbukti efektif dalam mempercepat pemrosesan data, meningkatkan akurasi pencatatan, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penggunaan aplikasi ini mengurangi waktu penyusunan laporan keuangan dan menurunkan tingkat kesalahan pencatatan.

b. Peningkatan Efisiensi

Implementasi aplikasi ini juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dengan penghematan waktu dan biaya operasional yang signifikan. Penggunaan aplikasi memungkinkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat dan terkontrol, serta mengurangi penggunaan kertas dan kebutuhan penanganan fisik dokumen.

c. Kendala yang Dihadapi

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh, beberapa kendala dihadapi selama implementasi, seperti masalah teknis, kebutuhan pelatihan tambahan bagi staf, dan resistensi terhadap perubahan. Masalah teknis meliputi gangguan sistem dan bug dalam aplikasi, sementara kebutuhan pelatihan muncul karena sebagian besar staf merasa perlu mendapatkan pelatihan tambahan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi. Resistensi terhadap perubahan terjadi karena beberapa staf masih terbiasa dengan metode manual.

d. Rekomendasi Perbaikan

Untuk mengatasi kendala yang ada, direkomendasikan untuk meningkatkan dukungan teknis, mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi staf, melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan persuasif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan aplikasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas penggunaan aplikasi keuangan di masa mendatang.

Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan dua alat penting yang saling terintegrasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan daerah pada UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan. Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem komplementer, yang jika digunakan bersama, dapat secara signifikan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Mereka membantu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya

keuangan dan informasi dilakukan dengan transparansi dan efisiensi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi sistem aplikasi keuangan ini telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pengelolaan belanja daerah di UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Tarakan. Dengan penanganan yang tepat terhadap kendala yang ada, aplikasi ini dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Terdapat saran yang dapat dilakukan agar aplikasi tersebut menjadi lebih efektif yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan program pelatihan bagi pegawai untuk memastikan semua pengguna memiliki keterampilan yang memadai.
2. Memperbaiki dan memelihara sistem aplikasi keuangan secara berkala untuk menghindari masalah teknis.
3. Mendorong pegawai untuk lebih terbuka terhadap teknologi baru melalui sosialisasi dan dukungan yang terus menerus.

E. Referensi

- Divisi Teknologi Informasi, (2019). *Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP): User Guide Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda*. Tarakan. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan timur dan Kalimantan Utara.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, T., & Kurniawan, A. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(4), 89-101.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Karunia, R. Luki, & Mabur Azas. (2022). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. Salemba empat; 5.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Pramono, M. Ali. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah: Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*;
- Primasari, Dona (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1)153-166.
- Rahayu, S. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 12(1), 67-79.
- Rasyid, Ak., M.M., C.A., Yuniar Yanuar. (2023). *Akuntansi Pemerintah di Indonesia: Tumbuh Membawa Manfaat; Diakses dari <https://kic2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/akuntansi-pemerintah-di-indonesia-tumbuh-membawa-manfaat-yuniar-yanuar-rasyid-b82e4d8f/detail/>*
- Santoso, A. B. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10, (2), 45-56.
- Siregar, H. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Suhardjanto, D. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Syarifuddin, Dastrianti (2020). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Di Pemerintah Kabupaten Sarmi. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(2) 174-198.

Wibowo, S. (2016). *Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.